

PENGARUH KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SUMATERA INDONESIA

Munzi Riandi¹⁾, Cut Risya Varlitya^{2)*}

¹Ekonomi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

email: munziriandi45@gmail.com

²Ekonomi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

email: cutrisyavarlitya@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of poverty and province minimum wages on income inequality on the island of Sumatra, Indonesia. The income inequality used is the Gini coefficient. The research data use panel data with ten provinces and four years from 2014-2017. The model used is the Fixed Effect Model (FEM). The results show that wages have a negative and significant effect on inequality. The other hand, poverty has a positive and significant effect on income inequality. The impact of poverty is higher than the wages of 0.20. This study recommends that the government should encourage policies to increase wages and reduce poverty. One of them is by way of better income retribution and improvement of education programs for the poor so that there will be opportunities for work and equity.

Keywords: *Income Inequality, Gini Coefficient, Province Minimum Wage, Poverty.*

Abstrak

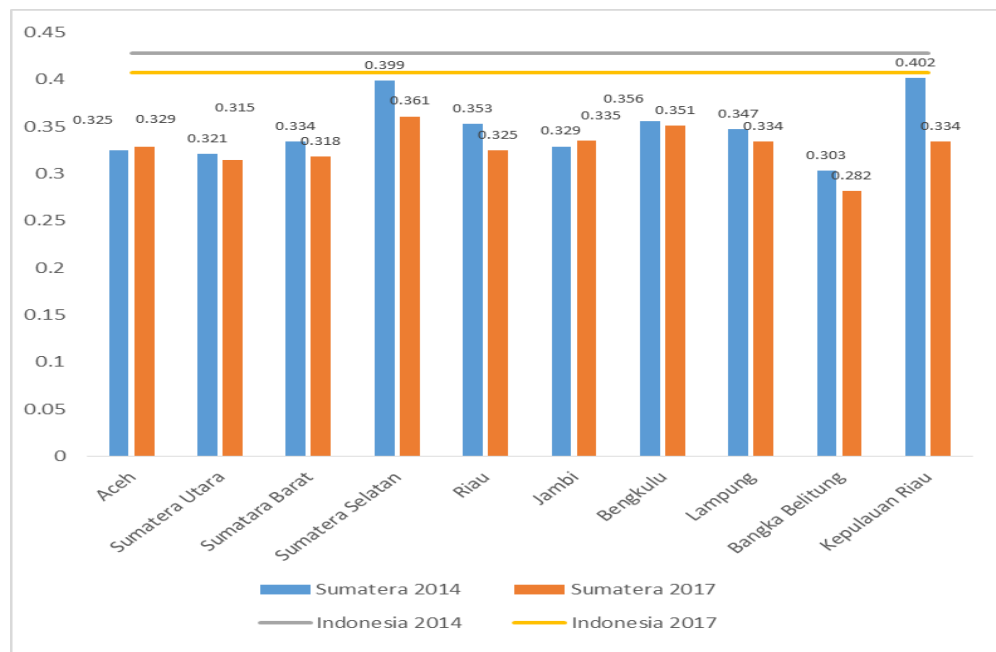
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi pada ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang dipakai ialah gini koefisien. Data penelitian menggunakan data panel dengan 10 provinsi dan 4 tahun dari tahun 2014-2017. Model yang digunakan yakni Fixed Effect Model (FEM). Hasil menunjukkan Upah Minimum Provinsi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Di sisi yang lain, kemiskinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dampak kemiskinan lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi yakni 0.20. Rekomendasi penelitian ini yakni pemerintah perlu mendorong kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan upah serta menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan cara redistribusi pendapatan yang lebih baik maupun peningkatan program pendidikan kepada masyarakat miskin agar terjadi kesempatan yang dalam bekerja dan terjadi pemerataan.

Kata Kunci: *Ketimpangan Pendapatan, Gini Koefisien, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan*

1. PENDAHULUAN

Isu tentang ketimpangan merupakan isu yang paling banyak dikaji dan selalu diperdebatkan. Ketimpangan yang dimaksud adalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi ini lebih dikenal dengan istilah ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan (Akombeng, 2016; Fosu, 2017). Permasalahan ketimpangan ini kerap berlangsung terhadap negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, India, China, dan Afrika. Sebagai contoh di Afrika, Akambi (2016) menjelaskan ketimpangan Afrika merupakan tantangan yang harus selalu diperhatikan dari segala aspek kegiatan ekonomi. Ketimpangan ini sebagai permasalahan utama karena hal ini sangat berpengaruh kepada struktur sosial-ekonomi. Adanya gap yang begitu besar dari sisi pendapatan kedua kelompok akan menciptakan jarak sosial baru dan memungkinkan jarak tersebut terus melebar. Biasanya ukuran untuk melihat ketimpangan ini menggunakan kurva Lorenz, gini koefisien, indeks Williamson, dan indeks theils.

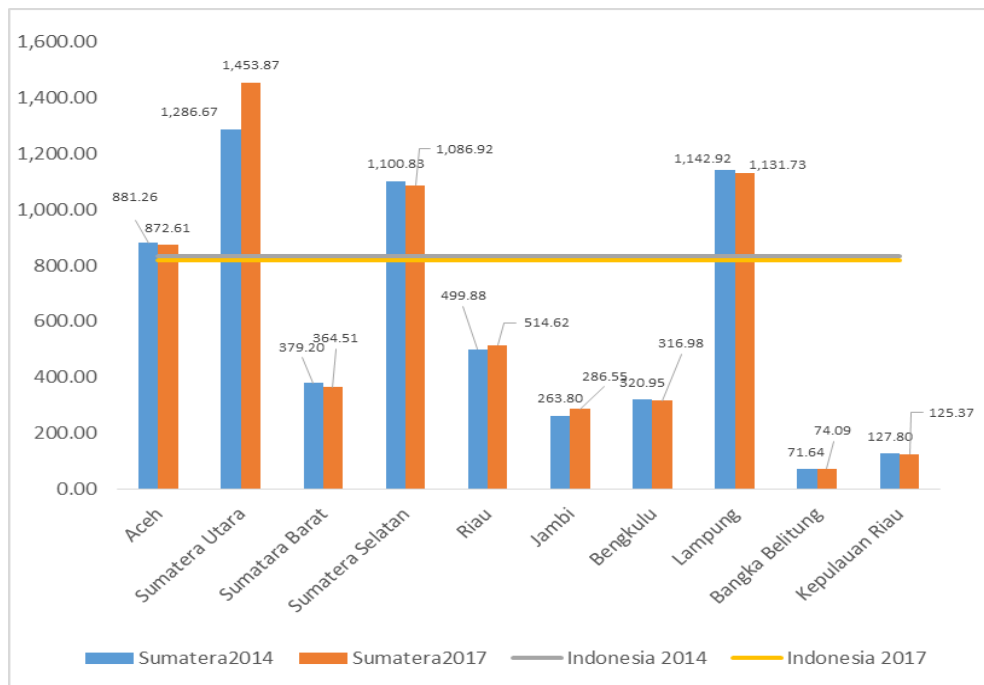
Pulau Sumatera mempunyai ciri-ciri alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang tersebar di setiap wilayah. Namun karakteristik ini membawa rintangan tersendiri layaknya area yang memiliki sumber daya alam dengan yang tidak memiliki sumber daya alam. Selain itu mempunyai sosial yang berbeda seperti tingkat kemiskinan yang berbeda antara kota dan desa. Begitu pula dengan ekonomi wilayah pesisir dengan wilayah pengunungan. Hal ini tentukan menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, upaya melakukan pemerataan harus tetap dilakukan di Pulau Sumatera. Tolok ukur pemerataan pembangunan tersebut dapat dilihat dari Gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: Statistik Indonesia (2018)

Gambar 1. Gini Koefisien 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014 dan 2017

Gambar 1 menjelaskan gini koefisien per provinsi dipulau sumatera 2014 dan 2017. Pengamatan pertama dari Provinsi Aceh di mana nilai gini koefisien di tahun 2014 sebesar 0,325 namun terjadi kenaikan di tahun 2017 sebesar 0,329. Sama halnya dengan Provinsi Jambi di mana adanya kenaikan gini koefisien dari 0,329 ke 0,355. Gambar ini juga memperlihatkan beberapa provinsi mengalami penurunan seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. Di antara delapan provinsi tersebut penurunan yang signifikan oleh Sumatera Selatan di mana tahun 2014 sebesar 0,399 menjadi 0,361 pada tahun 2017. Kemudian Kepulauan Riau dengan gini koefisien sebanyak 0,402 pada tahun 2014, 0,334 pada tahun 2017. Secara nasional (Indonesia) terlihat gini koefisien di pulau sumatera lebih rendah dibandingkan dengan gini Indonesia baik dalam tahun 2014 (0,428) dan 2017 (0,407).

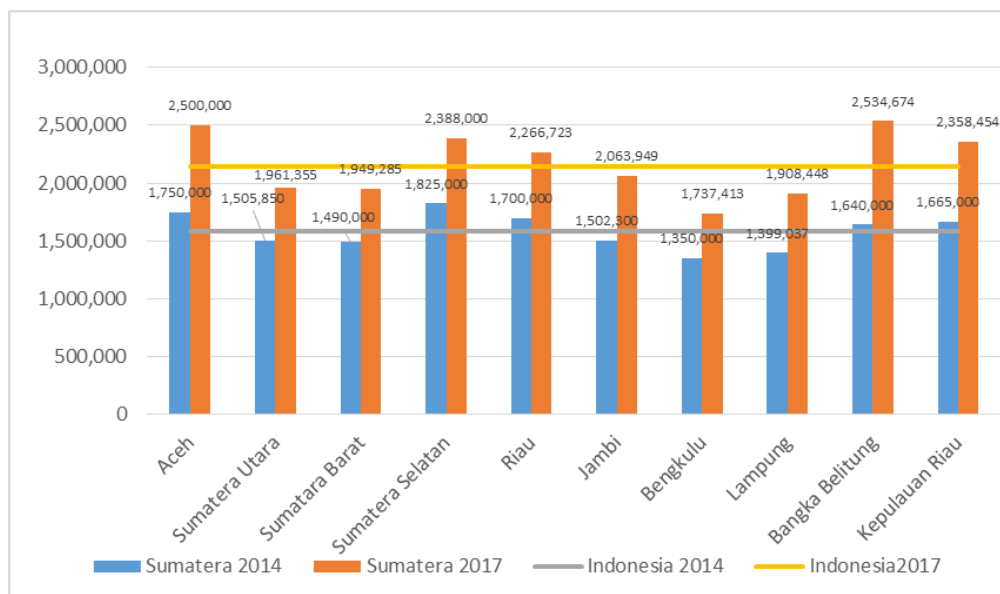


Sumber: Statistik Indonesia (2018)

Gambar 2 Kemiskinan 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014 dan 2017 (ribu jiwa)

Naik atau turunnya gini koefisien mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan (Beteille, 2003; Ayub, 2013; Sugiyarto dkk, 2015). Kedua saling tarik-menarik baik secara teori maupun dalam pengambilan kebijakan (Beteille, 2003). Kemiskinan berfungsi sebagai proksi antara kelas tinggi dan rendah. Semakin banyak masyarakat miskin maka distribusi pendapatan tentu akan semakin lebar. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit masyarakat miskin maka distribusi akan merata (Zulkifli, 2016). Gambar 2 menunjukkan Provinsi pulau Sumatra mengalami penurunan kemiskinan pada tahun 2014 hingga tahun 2017 kecuali Sumatera Utara di mana terdapat kenaikan yang cukup tinggi

sebesar 167,2 ribu jiwa dari tahun 2014 ke tahun 2017. Provinsi Sumatera Utara juga memperlihatkan sebagai provinsi dengan jumlah miskin terbanyak di Pulau Sumatera. Kemiskinan paling rendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung (71,64 ribu jiwa di tahun 2014 dan tahun 2017 sebanyak 74,09 ribu jiwa) dan Kepulauan Riau (127,8 di tahun 2014 dan 125,37 di tahun 2017. Berdasarkan jumlah kemiskinan dalam skala rata-rata nasional terlihat Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung di atas rata-rata nasional (831,77 ribu jiwa tahun 2014 dan 816,80 ribu jiwa di tahun 2017).



Sumber: Statistik Indonesia (2018)

Gambar 3. Upah Minimum Provinsi (UMP) 10 Wilayah di Pulau Sumatera Tahun 2014 dan 2017

Selanjutnya ketimpangan pendapatan sering dikaitkan dengan upah (Anshari dkk, 2018; Nangarumba, 2015). Menurut Sari (2017), menurunkan angka ketimpangan ini dengan melakukan kebijakan pada Upah Minimum. Upah ini berfungsi sebagai pencegah perbedaan/distribusi pendapatan pada kalangan pekerja seperti buruh yang tidak mempunyai skill untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu pendapatan juga sebagai kesejahteraan masyarakat (Nangarumba, 2015).

Gambar 3 menjelaskan upah minimum provinsi pulau Sumatera di masing-masing provinsi tidaklah sama. Pada Provinsi Aceh, tahun 2014 sebesar 1,75 juta rupiah dan mengalami kenaikan sebesar 2,5 juta rupiah atau kenaikan 750 ribu rupiah. Provinsi Riau tahun 2014 upah minimum provinsinya sebesar 1,7 juta rupiah dan terjadi peningkatan menjadi 2,06 juta rupiah di tahun 2017. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Lampung merupakan provinsi yang mempunyai upah minimum di bawah rata-rata nasional baik di tahun 2014 dan 2017. Berbeda dengan Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau mempunyai upah minimum di atas rata-rata provinsi baik di tahun 2014 dan tahun 2017. Di tahun 2017, Provinsi Bangka

Belitung merupakan provinsi yang mempunyai upah tertinggi dibandingkan Sembilan provinsi yakni sebesar 2,55 juta rupiah. Sedangkan upah minimum Nasional Tahun 2014 sebesar 1,58 dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 2.142 juta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan tidak lepas dari angka rasio gini. Menurut BPS (2016), Koefisien Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat keseluruhan ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan. Koefisien Gini diukur mulai angka 0 hingga 1, semakin tinggi nilai-nilai indeks Gini di suatu wilayah maka menunjukkan adanya ketidakmerataan pendapatan pada daerah tersebut semakin tinggi. Indeks gini yang menunjukkan angka nol menunjukan bahwa daerah tersebut terdapat pemerataan pendapatan yang sempurna, atau tidak ada ketimpangan pendapatan.

Menurut Adelman & Morris (1973), setidaknya terdapat 8 faktor penentu penyebab ketimpangan adalah:

1. Tingginya Pertumbuhan penduduk berefek pada penurunan pendapatan perkapita.
2. Faktor inflasi menjadi poin penting karena ini berpengaruh pada nilai uang. Inflasi yang semakin tinggi maka nilai riil uang semakin rendah. Dengan kata lain, kemampuan uang untuk membeli barang menjadi lemah.
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah akibat tidak merata.
4. Investasi modal lebih besar dibandingkan investasi tenaga kerja.
5. Mobilitas sosial rendah.
6. Substitusi impor.
7. Elastisitas permintaan dan penawaran tidak elastis antar negara/daerah.
8. Industri kecil seperti UMKM terus berkurang.

Kemiskinan

Miskin mempunyai makna tidak mempunyai harta yang tidak mampu memenuhi akan mencukupi dengan harta yang ada. Fakir adalah individu yang mempunyai harta sangat sedikit namun miskin tidak dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari (Mudawali, 2013). Fakir dan miskin tergolong kelompok masyarakat kelas bawah yang tidak mampu mencukupi akan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi tingkatan fakir dibawah katagori miskin.

Miskin dikategorikan sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhannya sehari-hari terutama konsumsi, baik itu sandang maupun pangan. Berawal dari ketidakadilan dan kepedulian masyarakat lingkungan sekitar, kelompok ini terus terjadi penambahan. Dengan segala jenis tindakan mereka lakukan untuk bertahan hidup tanpa memandang baik maupun buruk. Pada dasarnya kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan memiliki suatu barang akibat rendahnya pendapatan. Lebih tepatnya tidak terpenuhi kebutuhan hidup dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2006), definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk dapat hidup secara layak.

Upah Minimum

Upah ialah hasil kerja/usaha yang diberikan oleh perusahaan kepada seseorang dalam bentuk benda (uang). Besar kecilnya upah juga tergantung pada tingkat pekerjaan. Dalam pendekatan upah sering dikaitkan dengan sebuah sistem. Sistem yang dimaksud adalah sebuah peraturan yang tetap dan disahkan oleh suatu lembaga pusat yang guna menjaga kestabilan dan keadilan dalam memenuhi standar kebutuhan hidup. Upah adalah bentuk macam-macam pembayaran berdasarkan timbul dari kontrak kerja, terlepas dari pekerjaan dan demonisasinya. Upah dapat diartikan penghasilan yang diterima oleh pekerja berupa imbalan perkerjaan yang dilakukannya. Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun uang digital. (Fachrurrozi, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ada di 10 provinsi dari Pulau Sumatera, yakni untuk menentukan pengaruh dari kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi dan ketimpangan pendapatan. Data diobservasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Indonesia.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data panel dengan 10 wilayah dan 4 tahun. Tujuan data panel sebagai bentuk meminimumkan bias yang terjadi akibat regresi menggunakan time-series maupun cross-section serta mempelajari perilaku rumit akan sekumpulan data (Gujarati, 2003). Namun dalam mengestimasi melalui pendekatan model panel, setidaknya terdapat 3 jenis model yakni: Pooled Least Square (Pooled Model/Common Effect Model), Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Ketiga estimasi tersebut diuji dengan uji Chow dan uji Hausman. Adapun bentuk umum model panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_n X_{nit} + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Di mana, Y = variabel terikat, X = variabel bebas, α = konstanta, β = koefisien variabel, ε = residual, i = wilayah, t = waktu.

Kemudian model (1) dimasukkan variabel bebas dalam penelitian dengan bentuk logaritma natural, maka:

$$Gini_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \ln Kms_{it} + \beta_2 \ln Ump_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Di mana Gini = Koefisien Gini/ketimpangan pendapatan, Kms = Kemiskinan, Ump = Upah minimum provinsi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif memberi tambahan gambaran yang berasal dari data yang ditinjau dengan nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan di dalam penelitian yakni gini koefisien, upah minimum, dan kemiskinan. Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat diamati pada Tabel 1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Ketimpangan Pendapatan (Gini)	Kemiskinan	Upah
Mean	0.340650	623.5643	1878995.
Maximum	0.402000	1463.670	2534674.
Minimum	0.275000	71.64000	1350000.
Std. Dev.	0.027416	456.9109	307708.1

Sumber: data diolah (2019).

Tabel 1. menjelaskan nilai rata-rata gini koefisien sebanyak 0.34. Besaran nilai gini maksimum diketahui 0.40 dan nilai minimumnya adalah 0.275. Standar deviasi pada gini yakni 0.02. Ini menjelaskan besaran peningkatan maksimum rata-rata variabel gini koefisien sebanyak 0.02. Sementara itu, nilai rata-rata variabel kemiskinan sebesar 623 ribu jiwa. Nilai maksimum untuk variabel ini yakni 1463 atau 1,463 juta jiwa dan nilai minimum sebesar 71,6 atau 71,6 ribu jiwa. Standar deviasi kemiskinan diketahui yakni 456 artinya besaran peningkatan maksimum rata-rata variabel kemiskinan sebesar 456 ribu jiwa. Terakhir deskriptif variabel upah. Nilai rata-rata upah yakni 1878995 atau 1,87 juta rupiah. Nilai maksimum upah sebesar Rp2.534.674 dan minimum sebesar Rp1.350.000. Standar deviasi upah didapatkan 307708.1 artinya besaran peningkatan maksimum rata-rata variabel upah sebesar 307708.1

Estimasi Panel Data

Estimasi panel dalam penelitian terbagi atas tiga jenis yakni Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Ketiga model tersebut dilakukan estimasi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil estimasi tersebut ditampilkan pada Tabel 5.

Pertama, hasil estimasi CEM menjelaskan kemiskinan berefek positif namun tidak signifikan pada ketimpangan pendapatan, sedangkan Upah Minimum Provinsi mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan. Diketahui R-square model CEM sebesar 0.181 yang menjelaskan kemiskinan dan upah dapat menjelaskan ketimpangan sebesar 18,1 persen. Sedangkan sisanya diluar penelitian sebesar 81,9 persen. Secara simultan didapatkan kemiskinan dan upah berpengaruh bersama-sama terhadap ketimpangan.

Tabel 2. Hasil Estimasi Data Panel CEM, FEM, dan REM pada Gini Koefisien

Variabel	CEM		FEM		REM	
	Coef.	t-stat	Coef.	t-stat	Coef.	t-stat
Konstata	1.037*	2.77	0.121	0.266	1.17*	4.936
KMS	0.007	1.630	0.202*	2.904	0.009	1.114
Upah	-0.051	-2.009	-0.070*	-4.248	-0.062*	-3.885
R-square						
Adj. R-square	0.181		0.855		0.280	
Cross-Sections	10		10		10	
Periods	4		4		4	
Obs.	40		40		40	
F-stat	4.06*		15.09*		7.21*	
DW	0.47		2.02		1.75	
Jarque-Bera	0.63		0.84		0.53	

Sumber: data diolah (2019).

Kedua, hasil estimasi FEM menjelaskan hasil yang berbeda dengan CEM di mana variabel kemiskinan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila terjadi kenaikan kemiskinan sebanyak 1 persen maka ketimpangan pendapatan terjadi peningkatan sebanyak 0,20. Untuk variabel upah menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh ini secara statistik adalah signifikan. Apabila terjadi kenaikan Upah Minimum Provinsi sebanyak 1 persen maka ketimpangan pendapatan menurun sebanyak 0,07. R-Square model FEM lebih baik dari CEM yakni 0.855 artinya 85,5 persen variabel ketimpangan dapat dijelaskan oleh kemiskinan dan upah. Secara simultan didapatkan kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan. Ketiga, estimasi REM menunjukkan perbedaan dengan FEM yakni kemiskinan mempunyai dampak yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hanya upah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Koefisien upah REM tidak jauh berbeda dengan koefisien upah FEM yaitu sebesar 0.062. Ini menjelaskan pula apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1 persen maka terjadi pengurangan ketimpangan sebanyak 0,062. Akan tetapi dari sisi koefisien determinasi REM, R-square model ini hanya 0.28 yang artinya variabel ketimpangan dijelaskan oleh kemiskinan dan upah sebesar 28 persen. Secara simultan didapatkan kemiskinan dan upah berpengaruh bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengujian Model Panel

Setelah estimasi panel dilakukan maka tahap selanjutnya dilakukan penentuan model yang terbaik dari hasil ketiga estimasi sebelumnya. Pengujian ini menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Hasil pengujian ditampilkan pada table 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Penqujian Model Panel

Uji	Chi-Square Stat.	df.	Prob
Chow	69.44	9	0.000*
Hausman	7.89	2	0.019*

Sumber: data diolah (2019). *signifikansi 5 persen

Tabel 3 menjelaskan pada pengujian Chow mendapatkan nilai chi-square sebesar 69.44 dimana angka probabilitas 0.000. Hasil uji menunjukkan angka probabilitas lebih kecil dari 5 persen sehingga menolak H_0 yakni model FEM lebih baik dari model CEM. Sementara itu, pemilihan model dengan uji Hausman didapatkan model FEM lebih layak dianalisa karena nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari 5 persen. Dikarenakan pemilihan model FEM sebagai model terbaik, maka pengujian LM tidak dilakukan.

Analisa Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dengan FEM

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kemiskinan dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Berdasarkan model yang sesuai dari Tabel 5, maka persamaan hasil regresi FEM sebagai berikut:

$$\text{Gini} = 0,121 + 0,202(\text{KMS}) - 0,070(\text{UMP})$$

Dari hasil regresi (Tabel 2) FEM diatas menjelaskan bahwa masalah ketimpangan sangat ditentukan oleh kemiskinan dan upah minimum. Jika dilihat dari sudut upah, kemampuan daya beli seseorang yang berasal dari upah akan menentukan tingkat kesejahteraan seseorang didalam memenuhi keperluan sehari-hari baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Perbedaan orang pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah akan menentukan sekali jumlah barang yang akan dibeli. Hasil estimasi dalam penelitian ini menjelaskan upah mampu menurunkan ketimpangan sebanyak 0,07 apabila upah meningkat sebanyak 1 persen. Dengan adanya perubahan upah minimum maka gap antara pendapatan yang tinggi dengan pendapatan yang rendah menjadi menurun atau merata. Hasil estimasi menunjukkan hasil yang serupa dengan Sari (2017) dan Anshari, dkk (2018). Keduanya menjelaskan bahwa upah menjadi rentan apabila nilai kemampuan uang itu sendiri mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan harga barang-barang terus meningkat. Ini menjelaskan pula bahwa kalangan pendapatan rendah mengalami penurunan daya beli. Berbeda dengan kalangan pendapatan besar atau tinggi di mana mereka tidak mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga muncul gap yang lebih melebar antara kaya dan miskin.

Selanjutnya variabel kemiskinan menjadi acuan yang sangat penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Miskin sering diartikan sebagai individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kesempatan mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan menabung untuk masa depan tidak mungkin didapatkan. Hasil estimasi menjelaskan kemiskinan menjadi pemicu utama untuk meningkatkan ketimpangan itu sendiri. Penelitian ini memiliki kesamaan hasil dengan Hassan, et al (2015). Kenaikan kemiskinan

sebanyak 1 persen maka ketimpangan pendapatan meningkat secara signifikan sebesar 0,20.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh di mana nilai gini koefisien di tahun 2014 sebesar 0,325 namun terjadi kenaikan di tahun 2017 sebesar 0,329. Sama halnya dengan Provinsi Jambi di mana adanya kenaikan gini koefisien dari 0,329 ke 0,355. Beberapa provinsi juga mengalami penurunan seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. Di antara delapan provinsi tersebut penurunan yang signifikan oleh Sumatera Selatan di mana tahun 2014 sebesar 0,399 menjadi 0,361 di tahun 2017. Kemudian Kepulauan Riau dengan gini koefisien sebanyak 0,402 di tahun 2014 turun sebesar 0,334 di tahun 2017. Secara nasional (Indonesia) terlihat gini koefisien di pulau sumatera lebih rendah dibandingkan dengan gini Indonesia baik dalam tahun 2014 dan 2017.
2. Angka Kemiskinan di beberapa provinsi mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun 2017 kecuali Sumatera Utara di mana terdapat kenaikan yang cukup tinggi sebesar 167,2 ribu jiwa dari tahun 2014 ke tahun 2017. Provinsi Sumatera Utara juga memperlihatkan sebagai provinsi dengan jumlah miskin terbanyak di Pulau Sumatera. Kemiskinan paling rendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung (71,64 ribu jiwa di tahun 2014 dan tahun 2017 sebanyak 74,09 ribu jiwa) dan Kepulauan Riau (127,8 di tahun 2014 dan 125,37 di tahun 2017. Berdasarkan jumlah kemiskinan dalam skala rata-rata nasional terlihat Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung di atas rata-rata nasional (831,77 ribu jiwa tahun 2014 dan 816,80 ribu jiwa di tahun 2017).
3. Upah Minimum Provinsi Aceh pada tahun 2014 sebesar 1,75 juta rupiah, mengalami kenaikan sebesar 2,5 juta rupiah atau kenaikan 750 ribu rupiah. Provinsi Riau tahun 2014 upah minimum provinsinya sebesar 1,7 juta rupiah juga terjadi peningkatan mencapai 2,06 juta rupiah di tahun 2017. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Lampung merupakan provinsi yang mempunyai upah minimum di bawah rata-rata nasional baik di tahun 2014 dan 2017. Berbeda dengan Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau mempunyai upah minimum di atas rata-rata provinsi baik di tahun 2014 dan tahun 2017.
4. Variabel bebas pertama yakni kemiskinan memiliki efek positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila terjadi kenaikan kemiskinan sebanyak 1 persen maka ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 0,20.
5. Selanjutnya variabel bebas kedua yakni upah minimum menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila terjadi kenaikan upah minimum maka terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,07.
6. Antara Upah Minimum Provinsi dan kemiskinan, pengaruh kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dan kesimpulan, saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah, diharapkan upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan harus terus dilakukan. Salah satu caranya dengan menaikkan upah dan mengurangi jumlah kemiskinan. Melalui terjadi kenaikan upah maka seseorang mengalami peningkatan daya beli dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, untuk mengurangi jumlah kemiskinan ini, pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan masyarakat miskin seperti pendidikan. Pendidikan perlu diperhatikan karena ini memberikan peluang bagi orang miskin untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang layak dan sesuai dengan skill. Dengan demikian maka akan terjadi keadilan bagi orang kaya dengan yang tidak mampu.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan variabel indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akobeng, E. (2016). Out of inequality and poverty: Evidence for the effectiveness of remittances in Sub-Saharan Africa. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 60, 207–223.
- Akanbi, O. A. (2016). The growth, poverty and inequality nexus in South Africa: Cointegration and causality analysis. *Development Southern Africa*, 33(2), 166–185. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2015.1120654>
- Ayub, M. (2013). Poverty and Inequality. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 5(3), 329–346.
- Ashari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *EcoGen*, 1(September), 494–502.
- Adelman, I. and Morris, C. T. (1973). Economic growth and social equity in developing economies. *ASA Review Book*, pp 115-121.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia 2018. Aceh.
- Beteille, A. (2012). Poverty and Inequality. *Economic And Political Weekly*, 38(42), 4455–4463
- Badan Pusat Statistik (2006). Statistik Indonesia 2006. Aceh.
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306–336
- Fachrurrozi, K. (2014). Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala
- Gujarati. D. (2003). *Basic econometrics, forth edition*. New York: Mac-GrawHill.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1), 57–71.
- Mudawali, I. (2013). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.
- Sari, E. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera Tahun 2001-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zulkifli. (2016). Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan. *EcceS*, 3(1).